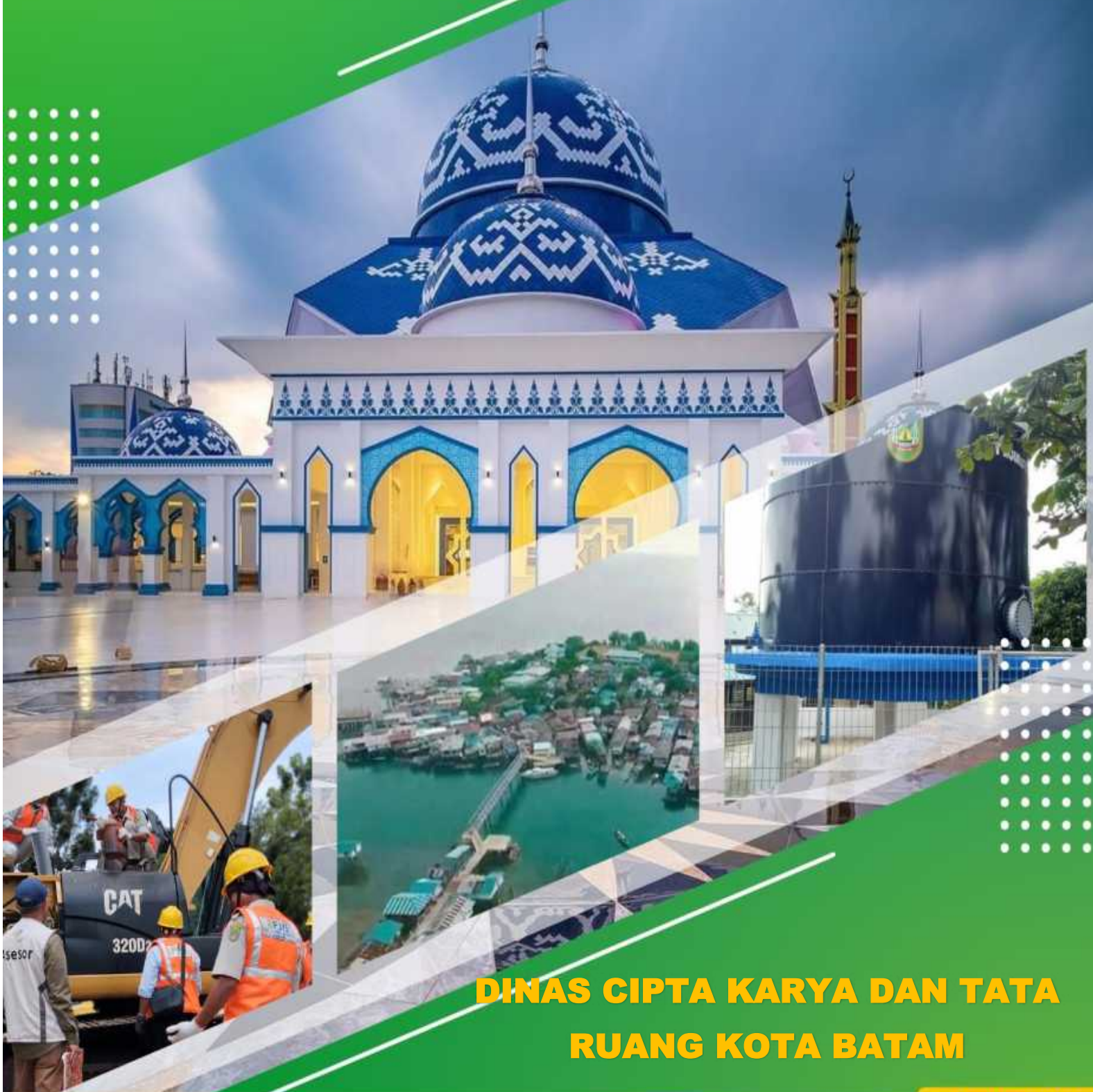




PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

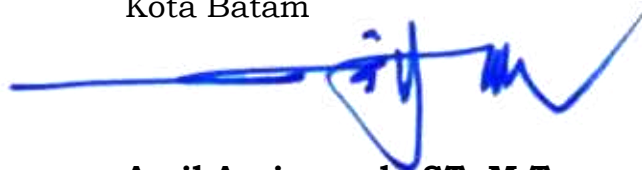
Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 s.d 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 01 Juli 2025

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19730408 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL/GAMBAR.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan4

1.4. Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....6

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 20256

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14

3.1. PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 14

3.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 14

BAB IV PENUTUP41

4.1. Catatan Penting.....41

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan41

4.3. Rencana Tindak Lanjut42

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 2.1.	:	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2025
Tabel 2.2.	:	Pencapaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan I
Tabel 3.1	:	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau ;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:



- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. Penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana .Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121).
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023;
24. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
25. Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Perubahan tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN



Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 (2.2), analisis kinerja pelayanan OPD (2.3), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

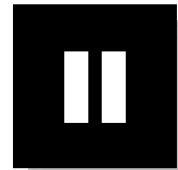
Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan (4.1), Catatan penting dalam penyusunan renja (4.2), Kaidah –kaidah pelaksanaan (4.3), rencana tindak lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN





BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 24.96 % atau capaian realisasi sebesar 24.96 %
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 0 % atau capaian realisasi sebesar 0 %
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 25 % atau capaian realisasi sebesar 25 %
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 24.31 % atau capaian realisasi sebesar 24.31 %
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1.400 jiwa diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 32 jiwa atau capaian realisasi sebesar 2.29 %
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 900 jiwa diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 0 jiwa atau capaian realisasi sebesar 0 %
- d. Program Program Penataan Bangunan Gedung
 - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan



Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan target 440 unit diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 114 unit atau capaian realisasi sebesar 25.91 %

e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen jiwa diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 0 dokumen atau capaian realisasi sebesar 0 %
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan target 5 dokumen diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 0 dokumen atau capaian realisasi sebesar 0 %

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 25.00 % atau capaian realisasi sebesar 25.00 %%

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 60.36 % atau capaian realisasi sebesar 60.36 %
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan target 100 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 24.78 % atau capaian realisasi sebesar 24.78 %

b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan target 83.67 % diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 99 % atau capaian realisasi sebesar 99 %

c. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dengan target 104 dokumen diakhir tahun, terrealisasi di triwulan I sebesar 121 dokumen atau capaian realisasi sebesar 116.35 %



Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 S.D. TRIWULAN I
TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	27.56 %	27.56
1.03.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100 %	24.96	24.96 %
1.03.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	142 Orang/bulan	258.18 %
1.03.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	30.00%
1.03.01.2. 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	-	-
1.03.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	100 %	0	0
1.03.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-
1.03.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	0
1.03.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	25.00%	25.00%
1.03.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,24 Paket	24.00%
1.03.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	0,77 Paket	17.00%
1.03.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,00 Paket	50.00%
1.03.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	30.00%
1.03.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	30.00%
1.03.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	60.36%	60.36%
1.03.01.2. 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 unit	3 unit	50.00%
1.03.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 unit	0	0
1.03.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 unit	0	0
1.03.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	24.42%	24.42%



Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.03.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	30.00%
1.03.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-
1.03.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	30.00%
1.03.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100	24.31 %	24.31 %
1.03.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3 Unit	30.00%
1.03.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	3 Unit	20.00%
1.03.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	21 Unit	20.59%
1.03.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0.30 Unit	30.00%
1.03.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	24,78%	24.78%
1.03.01.2. 10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0.30 Unit Kerja	30.00%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	51.99%	50.83 %	97.77 %
1.03.03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.400	32	2.29%
1.03.03.2. 01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	0.125 Dokume n	6,25%
1.03.03.2. 01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	0.125 Liter/De tik	2,50%
1.03.03.2. 01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	0.125 Liter/De tik	5,00%
1.03.03.2. 01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 Unit	32 Unit	94.12%
1.03.03.2. 01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150	0.125 SR	0,08%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	16.50%	23.18%	140.48 %
1.03.05.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	900	0	0 %



Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.03.05.2. 01.0003	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	-	-	-
1.03.05.2. 01.0004	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	-	-	-
1.03.05.2. 01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	150 Rumah Tangga	0	0
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	83.33%	86.82%	104.19 %
1.03.08.2. 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	440 Unit	114 Unit	25.91%
1.03.08.2. 01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	7 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.08.2. 01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.08.2. 01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	0 Dokume n	0,00%
1.03.08.2. 01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	423 dokumen	114 dokume n	26.95%
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan,	83.45	67.20%	80.53%
1.03.11.2. 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	83.67%	99 %	99 %
1.03.11.2. 01.0006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang	0	0
1.03.11.2. 01.0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100 Orang	0	0
1.03.11.2. 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	1	-	-
1.03.11.2. 02.0006	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen Dokumen	-	-



Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.03.11.2. 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 %	-	-
1.03.11.2. 04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dokumen	-	-
1.03.11.2. 04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Laporan	-	-
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	93.41	91.58%	98.04%
1.03.12.2. 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	104 Dokumen	121 Dokume n	116.35 %
1.03.12.2. 01.0002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	102 Dokumen	121 Dokume n	118.63 %
1.03.12.2. 01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	0 Dokume n	0 %
1.03.12.2. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	100 peserta	-	-
1.03.12.2. 02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	-	-
1.03.12.2. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	1 Dokumen	0 Dokume n	0
1.03.12.2. 03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	0	0
1.03.12.2. 03.0002	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dibangun dan dikembangkan		-	-
1.03.12.2. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	7 Dokumen	0	0
1.03.12.2. 04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	-	-
1.03.12.2. 04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	-	-
1.03.12.2. 04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	0	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	Persentase	93,41	Persentase	91,58	
2	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas	Persentase	100	Persentase	27,56	
3	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase	83,33	Persentase	86,82	
4	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase	83,45	Persentase	67,20	
5	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Persentase	54,52	Persentase	50,83	
6	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Persentase	16,50	Persentase	23,18	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kinerja yang tercapai di triwulan I ini hanya terbatas pada kinerja yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin, Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan dari pengawasan bangunan dan menara serta Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas.

Ketidaktercapaian target kinerja di triwulan pertama merupakan kondisi normal, terutama pada instansi teknis mengingat proses pelaksanaan kegiatan, terutama fisik, yang membutuhkan waktu yang panjang dalam proses persiapan dan penyelenggaraan kegiatannya. Triwulan pertama digunakan sepenuhnya untuk persiapan kegiatan, termasuk proses penetapan P3DN sebagai langkah awal dalam pemilihan barang dan vendor pada proses pengadaan. Selain persyaratan administrasi yang berimbas pada waktu penyelesaian proses pengadaan, tidak ada kendala lain yang secara signifikan mempengaruhi proses pengadaan.

Namun demikian, sebagai salah satu OPD yang berfokus terhadap pemenuhan infrastruktur fisik, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam, optimis akan dapat mencapai kinerja secara optimal di akhir tahun anggaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029, isu-isu penting/strtegis yang



menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi adalah meliputi :

1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana dan sarana bangunan baik bangunan pemerintah maupun fasilitas untuk masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan tata ruang antara penyelenggaraan tata ruang nasional, provinsi dan kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang.
3. Menyelaraskan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah hinterland.
4. Praktek penyelenggaraan ke Cipta Karya-an ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kretativitas yang masih terbatas.
5. Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan asset.
6. Kualitas SDM di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang saat ini masih kurang memadai.

Keenam isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tidak terkecuali pada perencanaan program kegiatan Tahun 2025

Selain isu teknis sebagaimana dijabarkan diatas, isu lain yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja di tahun 2025 ini adalah efisiensi belanja yang didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi yang dilakukan berakibat terhadap optimalisasi anggaran, dimana keterbatasan anggaran memaksa instansi untuk melaksanakan tupoksinya secara lebih efektif.

Isu-isu inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertamanan tahun 2025. Jawaban atas isu yang berkembang diwujudkan dalam rencana kerja perubahan dengan harapan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.





BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tersedia. Untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada belanja awal Rencana Kerja adalah sebesar Rp. 273.164.019.754,-, sedangkan perubahan Rencana Kerja adalah sebesar Rp. 145.451.841.408,- berkurang sebesar Rp. 127.712.178.346,-, yang berakibat ada beberapa paket pekerjaan yang terpaksa dilakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan, serta merasionalisasikan beberapa belanja yang dianggap kurang penting yang berdampak terhadap belanja wajib.

3.2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.1.3. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2.2. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- 1.3.4. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.5. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.4.2. Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.4.3. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.7.1. Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2.1.2. Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 2.1.3. Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 2.1.4. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2.1.5. Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Subkegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- 4. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 4.1.1. Subkegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



- 4.1.2. Subkegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.3. Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.4. Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 5.1.1. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
 - 5.1.2. Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
 - 5.2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
 - 5.3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - 5.3.1. Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 - 5.3.2. Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 - 5.3.3. Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 6.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Subkegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 6.1.2. Subkegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
 - 6.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.2.1. Subkegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 6.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.3.1. Subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 6.3.2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - 6.4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.4.1. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 6.4.2. Subkegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
 - 6.4.3. Subkegiatan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

Rincian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 tertuang dalam tabel sebagai berikut :



Table 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						273.164.019.754	142.276.789.408	130.887.230.346	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	100 %	85 poin 71 angka	34.960.808.928	30.317.518.024	-4.643.290.904	
1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adminisrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	24.453.507.178	19.784.163.275	-4.669.343.903	
1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dancTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dancTunjangan ASN	55 Orang/bulan	165 Orang/bulan	24.453.507.178	19.478.463.275	-4.975.043.903	
	Belanja Gaji Pokok PNS	Belanja Gaji Pokok PNS					3.412.321.340	2.748.960.213	-663.361.127	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK					3.828.919.837	2.856.533.500	-972.386.337	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					353.325.066	307.782.886	-45.542.180	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					230.918.692	328.348.177	97.429.485	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					148.450.750	151.549.375	3.098.625	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					153.774.600	145.262.400	-8.512.200	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					98.579.500	69.002.250	-29.577.250	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					221.963.714	165.170.625	-56.793.089	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	Belanja Tunjangan Beras PNS					280.275.106	161.293.824	-118.981.282	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Belanja Tunjangan Beras PPPK					182.289.417	218.424.152	36.134.735	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					795.334.532	919.727.248	124.392.716	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					101.637.188	70.437.481	-31.199.707	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Belanja Pembulatan Gaji PNS					42.548	37.597	-4.951	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					83.351	79.329	-4.022	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					389.085.831	253.195.441	-135.890.390	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					310.306.667	272.829.513	-37.477.154	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					6.150.344	6.597.505	447.161	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					7.330.584	6.855.680	-474.904	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					18.451.316	19.792.514	1.341.198	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					21.990.840	20.567.041	-1.423.799	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					19.364.798	20.631.575	1.266.777	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					22.320.458	10.456.451	-11.864.007	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					3.920.438.655	3.517.621.580	-402.817.075	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					2.866.366.753	2.436.899.305	-429.467.448	
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					-	195.533.240	195.533.240	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					3.587.254.144	3.114.545.603	-472.708.541	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					3.193.931.147	1.460.328.770	-1.733.602.377	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					282.600.000	-	-282.600.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	12 Dokumen	0	305.700.000	305.700.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					-	23.100.000	23.100.000	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					-	282.600.000	282.600.000	
1.03.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	0	-	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-						-	-	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-						-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-						-	-	
1.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	349.420.000	30.570.000	-318.850.000	
1.03.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	0	-	-	-	
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-					-	-	-	
1.03.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	3 Orang	349.420.000	30.570.000	-318.850.000	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					165.000.000	16.500.000	-148.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					184.420.000	14.070.000	-170.350.000	
1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	1.309.035.000	574.392.000	-734.643.000	
1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.128.000	4.444.000	-11.684.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					16.128.000	4.444.000	-11.684.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	4 Paket	388.582.000	216.173.000	-172.409.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					127.810.000	77.760.000	-50.050.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					46.670.000	17.800.000	-28.870.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-					22.000.000	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					135.250.000	75.973.000	-59.277.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					56.852.000	44.640.000	-12.212.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-					-	-	-	
1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	42.375.000	6.000.000	-36.375.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					41.600.000	6.000.000	-35.600.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-					775.000	-	-775.000	
1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	118.000.000	18.000.000	-100.000.000	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-					100.000.000	-	-	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					18.000.000	18.000.000	0	
1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	12 Laporan	743.950.000	329.775.000	-414.175.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					743.950.000	329.775.000	-414.175.000	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.988.952.000	2.046.865.000	57.913.000	
1.03.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	971.812.000	1.419.180.000	447.368.000	
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					751.450.000	1.235.545.000	484.095.000	
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					220.362.000	183.635.000	-36.727.000	
1.03.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	161.006.000	217.081.000	56.075.000	
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					39.126.000	181.426.000	142.300.000	
	Belanja Modal Mebel	Belanja Modal Mebel					121.880.000	35.655.000	-86.225.000	
1.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 Unit	35 Unit	856.134.000	410.604.000	-445.530.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.805.000	3.473.000	-4.332.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					6.035.000	4.622.000	-1.413.000	
	Belanja Modal Alat Pendingin	Belanja Modal Alat Pendingin					68.100.000	31.600.000	-36.500.000	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					160.940.000	137.395.000	-23.545.000	
	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Computer					478.547.000	179.632.000	-298.915.000	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					134.707.000	53.882.000	-80.825.000	
1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	693.447.408	676.564.128	-16.883.280	
1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	541.620.00	497.780.000	-	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					-	20.000.000	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Telepon					8.100.000	8.100.000	0	
	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air					102.000.000	102.000.000	0	
	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik					240.000.000	240.000.000	0	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	Belanja Kawat/Faksimili/Internet					191.520.000	127.680.000	-63.840.000	
1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	151.827.408	178.784.128	26.956.720	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					142.043.280	168.000.000	25.956.720	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					8.400.000	9.400.000	1.000.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					350.928	350.928	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.033.200	1.033.200	-	
1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	961.373.400	981.323.400	19.950.000	
1.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	42.040.000	77.760.000	35.720.000	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					-	1.200.000	1.200.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					42.040.000	76.560.000	34.520.000	
1.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	19 Unit	611.933.400	616.243.400	4.310.000	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					36.233.400	47.333.400	11.100.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan					612.850.000	554.240.000	-58.610.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang								
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					4.890.000	14.670.000	9.780.000	
1.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	64 Unit	68.000.000	43.120.00	-24.880.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					21.350.000	15.250.000	-6.100.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					21.900.000	14.600.000	-7.300.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					10.950.000	2.920.000	-8.030.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					13.800.000	10.350.000	-3.450.000	
1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	239.400.000	244.200.000	4.800.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					234.600.000	239.400.000	4.800.000	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					4.800.000	4.800.000	0	
1.03.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	100 %	5.205.073.942	6.223.640.221	1.018.566.279	
1.03.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	5.205.073.942	6.223.640.221	1.018.566.279	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD					5.205.073.942	5.606.989.711	401.915.769	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					-	616.650.510	616.650.510	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	51.99 %	52.92 %	93.731.780.940	56.872.874.813	-36.858.906.127	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.400 jiwa	1.300 jiwa	93.731.780.940	56.872.874.813	-36.858.906.127	
1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	666.000.000	333.000.0000	2.664.000.000	
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Mubut Kec. Galang	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Mubut Kec. Galang					333.000.000	333.000.000	-	
	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Tambar Kec Belakang Padang	-					333.000.000	-	-	
	Konsultan Perencanaan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang							99.000.000		
1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	22.150.144.350	25.885.399.843	3.735.255.493	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Aweng Temoyong (100 M3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Aweng Temoyong (100 M3)					112.110.000	112.110.000	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Belakang Padang (200 M3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Belakang Padang (200 M3)					137.640.000	137.640.000	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Geranting (50 M3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Geranting (50 M3)					81.030.000	81.030.000	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Temoyong (200 M3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Temoyong (200 M3)					137.640.000	137.640.000	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Temoyong (50 M3)	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Temoyong (50 M3)					81.030.000	81.030.000	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Air Gara (50 M3)	-					81.030.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Air Lingka (50 M3)	-					81.030.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Bertam (200 M3)	-					137.640.000	-	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Bulang Lintang (100 M3)	-					112.110.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Buluh (250 M3)	-					153.180.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Jaloh (200 M3)	-					137.640.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Kasu (100 M3)	-					112.110.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Lengkang (100 M3)	-					112.110.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Mecan (100 M3)	-					112.110.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Petong (100 M3)	-					112.110.000	-	-	
	Pemeliharaan Tangki Reservoir Pulau Terong (100 M3)	-					112.110.000	-	-	
	Pembangunan Pagar SWRO Pulau Labu	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Air Lingka	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Bulang Lintang	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Geranting	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Petong	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Air	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Bertam	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Temoyong	-					264.807.150	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Seraya	-					264.807.150	-	-	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Tiangwangkan	-					2.491.950.000	-	-2.491.950.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Terong	-					1.149.960.000	-	-1.149.960.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Pemping	-					4.728.600.000	-	-4.728.600.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Pecung	-					1.149.960.000	-	-1.149.960.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Mecan	-					1.149.960.000	-	-1.149.960.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Kasu	-					702.630.000	-	-702.630.000	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Jaloh	-					702.630.000	-	-	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Belakang Padang	-					1.149.960.000	-	-	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Ngenang	Optimalisasi/Peningkatan WTP Ngenang					4.728.600.000	5.737.146.000	1.008.546.000	
	Optimalisasi SWRO Belakang padang	Optimalisasi SWRO Belakang padang						19.598.803.843	19.598.803.843	
1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	2.5 Liter/Detik	39.407.200.000	11.471.624.000	-27.935.576.000	
	Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang					13.649.000.000	11.471.624.000	-2.177.376.000	
	Pembangunan SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec. Galang	-					5.723.600.000	-	-	
	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang	-					5.834.600.000	-	-	
	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	-					5.723.600.000	-	-	
	Lanjutan Pembangunan SWRO Belakang Padang	-					8.476.400.000	-	-	
1.03.03.2.0 1.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 Unit	33 Unit	25.864.752.590	18.291.742.970	-7.573.009.620	
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Belanja Bahan-Bahan Kimia					15.763.578.270	10.355.657.130	-5.407.921.140	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					4.707.850.000	4.707.850.000	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					386.100.000	316.800.000	-69.300.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					4.700.800.000	2.730.600.000	-1.970.200.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					261.600.000	151.000.000	-110.600.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					11.206.080	6.450.960	-4.755.120	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					33.618.240	23.384.880	-10.233.360	
1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	150 SR	207 SR	5.643.684.000	891.108.000	-4.752.576.000	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Batu Legong Kec. Bulang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Kasu Kec. Belakang Padang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pecong Kec. Belakang Padang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pulau Abang Kec. Galang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Sumber Dana : PE	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Sijantung Kec. Galang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang	-					297.036.000	-	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Temoyong Kec. Bulang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec. Galang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SWRO Belakang Padang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	-					297.036.000	-	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang					297.036.000	297.036.00	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SWRO Belakang Padang	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SWRO Belakang Padang					297.036.000	297.036.00	-	
	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) WTP Ngenang Kec. Nongsa	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) WTP Ngenang Kec. Nongsa					297.036.000	297.036.00	-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	16.5 %	57.64 %	6.075.185.400	4.171.646.400	-1.903.539.000	
1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	900 jiwa	600 jiwa	6.075.185.400	4.171.646.400	-1.903.539.000	
1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	160 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	6.075.185.400	4.171.646.400	-1.903.539.000	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sijantung Kec. Galang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Karas Kec. Galang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Galang Baru Kec. Galang	-					297.924.000	-	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Abang Kec. Galang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Air Raja Kec. Galang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang					297.924.000	750.264.480	452.340.480	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang					297.924.000	750.264.480	452.340.480	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pemping Kec. Belakang Padang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kasu Kec. Belakang Padang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang					297.924.000	750.264.480	452.340.480	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pecong Kec. Belakang Padang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Ngenang Kec. Nongsa	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)					297.924.000	750.264.480	452.340.480	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Air Kel. Batu Legong Kec. Bulang	Pulau Air Kel. Batu Legong Kec. Bulang								
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang					242.424.000,	750.264.480	507.840.480	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Nguan Kel Galang Baru Kec. Galang	-					297.924.000	-	-	
	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel Temoyong Kecamatan Bulang	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel Temoyong Kecamatan Bulang					297.924.000	750.264.480	452.340.480	
	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	122.400.000	122.400.000	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	83.33 %	16.67 %	129.679.457.486	48.619.578.443	81.059.897.043	-
1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	440 unit	440 unit	129.679.457.486	48.619.578.443	81.059.897.043	-
1.03.08.2.0 1.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuaikan	8 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	53.122.433.416	24.675.519.579	28.446.913.837	-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli					810.000.000	675.000.000	-135.000.000	
	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Sengkuang	-					-	-	-	
	Rehabilitasi Kantor Lurah Batu Besar	Rehabilitasi Kantor Lurah Batu Besar					1.574.226.000	1.567.839.000	-6.387.000	
	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Belian	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Belian					1.574.226.000	1.471.021.000	-103.205.000	
	Rehabilitasi Kantor Lurah Tanjung Buntung	Rehabilitasi Kantor Lurah Tanjung Buntung					1.574.226.000	1.567.839.000	-6.387.000	
	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Tiban Indah	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Tiban Indah					1.574.226.000	1.567.839.000	-6.387.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Kantor					-	97.818.000	97.818.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
		Lurah Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk								
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Mangsang Kec. Sei Bedu					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Duriangkang Kec. Sei Beduk					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Patam Lestari Kec. Sekupang					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Gedung Kantor Camat Belakang Padang					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Camat Batu Ampar					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi Kantor Lurah Sungai Jodoh					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Sungai Harapan Kec. Sekupang					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Batu Merah					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Baloi Indah					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Lubuk Baja Kota					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Kampung Pelita					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Tanjung Riau					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Revitalisasi kantor Lurah Tanjung Pinggir					-	97.818.000	97.818.000	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	-	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi kantor Lurah Tiban Baru					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi kantor Camat Sekupang					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi kantor Camat Lubuk Baja					-	97.818.000	97.818.000	
		DED Revitalisasi Gedung Beringin						1.515.000.000	1.515.000.000	
		DED Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah)						348.420.000	348.420.000	
	Revitalisasi Gedung Sanggar Pramuka	-					-	-	-	
	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam					1.867.611.000	2.003.881.500	136.270.500	
	Revitalisasi Kantor Camat Belakang Padang	-					1.363.317.318	-	-	
	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)					6.106.418.600	6.008.600.600	-97.818.000	
	Revitalisasi Masjid Raya Baiturrahman Kec Sekupang	Revitalisasi Masjid Raya Baiturrahman Kec Sekupang					4.082.510.000	4.082.510.000	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam centre	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam centre					1.111.000.000	1.111.000.000	-	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Kec Sekupang (Pendingin Ruangan)					-	2.020.000.000	2.020.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Kec Sekupang (Wall Panel)						840.265.479	840.265.479	
		Rehabilitasi Toilet Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah						496.473.700	496.473.700	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah (Lampu Taman)						550.450.000	550.450.000	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah (Perbaikan Lampu Signage)						590.850.000	590.850.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (Lampu Taman)						131.300.000	131.300.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Batam Centre (Camera CCTV)						505.000.000	505.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Kec. Sekupang (Sistem Tata Suara)						540.350.000	540.350.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Kec. Sekupang (Camera CCTV)						489.850.000	489.850.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman Kec. Sekupang (Layar Informasi)						272.700.000	272.700.000	
1.03.08.2.0 1.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	8.399.791.112	7.708.134.684	-691.656.428	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					5.226.999.400	4.860.199.400	-366.800.000	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.126.694.400	798.075.200	-328.619.200	
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					292.500.000	168.750.000	-123.750.000	
	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air					391.000.000	204.000.000	-187.000.000	
	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik					688.000.000	496.000.000	-192.000.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					72.000.000	49.000.000	-23.000.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN					3.110.400	2.112.000	-998.400	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					9.699.912	6.279.084	-3.420.828	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-					80.000.000	-	-	
	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah					254.893.500	871.100.000	616.206.500	
	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre					254.893.500	252.619.000	-2.274.500	
1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	8 Dokumen	66.515.562.958	15.778.321.540	-50.737.241.418	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					112.500.000	225.000.000	112.500.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					5.600.000	3.800.000	-1.800.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					219.456	147.600	-71.856	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					648.000	435.600	-212.400	
	Pembangunan Masjid Al Islah	Pembangunan Masjid Al Islah					1.198.293.000	1.198.293.000	-	
	-	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					-	5.960.000	5.960.000	
	Pembangunan kantor Lurah Tanjung Sengkuang	Pembangunan kantor Lurah Tanjung Sengkuang					1.794.406.000	1.788.019.000	-6.387.000	
	Pembangunan Gedung Aula Kantor Lurah Duriangkang Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk	Pembangunan Gedung Aula Kantor Lurah Duriangkang Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk					380.772.570	324.250.000	-56.522.570	
	Pembangunan Gedung Aula Kecamatan Sekupang	Pembangunan Gedung Aula Kecamatan Sekupang					625.900.000	625.900.000	-	
	Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam	Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam					760.957.170	823.879.740	62.922.570	
	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sagulung Kota Kec. Sagulung	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sagulung Kota Kec. Sagulung					1.794.406.000	1.788.019.000	-6.387.000	
	Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi Kec. Batam Kota	Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi Kec. Batam Kota					1.794.406.000	1.788.019.000	-6.387.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	-	Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Tiban Lama					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Pembangunan kantor Lurah Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Nongsa					-	97.818.000	97.818.000	
	-	Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Batu Selicin					-	97.818.000	97.818.000	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Bersama 2						1.201.900.000	1.201.900.000	
		DED Gedung Terpadu RSUD						1.616.000.000	1.616.000.000	
	Lanjutan Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam	-					4.270.178.000	-	-	
	Semenisasi Kantor Halaman Kelurahan Bengkong sadai	-					308.970.000	-	-	
	Pembangunan Mushalla Puskesmas DKM Botania 1, Kec. Batam Kota	Pembangunan Mushalla Puskesmas DKM Botania 1, Kec. Batam Kota					255.863.600	255.863.600	-	
	Pembangunan Landscape Masjid Agung Batam Centre	Pembangunan Landscape Masjid Agung Batam Centre					4.355.469.000	4.355.469.000	-	
	Pembangunan Pagar Masjid Agung Batam Centre	Pembangunan Pagar Masjid Agung Batam Centre					3.243.360.000	3.554.037.000	310.677.000	
	Lanjutan Pembangunan Pagar Dataran Engku Putri Batam Centre	-					2.472.928.000	-	-	
1.03.08.2.0 1.1023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	330 Dokumen	422 Dokumen	1.641.670.000	457.602.640	-1.184.067.360	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-					171.000.000	-	-	
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					-	-	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					451.750.000	75.000.000	-376.750.000	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli					378.000.000	378.000.000	0	
	-	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					-	-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					26.400.000	4.000.000	-22.400.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-					507.320.000	-	-	
	Pembangunan Pagar WTP Pulau Air	-					107.200.000	-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					-	764.256	764.256	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					-	2.253.600	2.253.600	
	Belanja Sewa Hotel	-					-	-	-	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, dan peningkatan kualifikasi tenaga konstruksi	83.45 persen	12.88 %	807.957.000	518.274.000	-289.683.000	
1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	83.67 persen	16.67 %	807.957.000	518.274.000	-289.683.000	
1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	300 Orang	505.659.000	391.686.000	-113.973.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					43.959.000	10.284.000	-33.675.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-					330.000	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.800.000	26.400.000	6.600.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					88.500.000	88.500.000	-	
	Belanja Pakaian Siaga	Belanja Pakaian Siaga					48.000.000	48.000.000	-	
	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Belanja Registrasi/Keanggotaan					235.000.000	185.000.000	-50.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	33.502.000	33.502.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					70.070.000	-	-	
1.03.11.2.0 1.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	19 Lembaga	302.298.000	126.588.000	-175.710.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					30.358.000	34.374.000	4.016.000	
	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					-	18.150.000	18.150.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-					440.000	-	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					57.300.000	45.800.000	-11.500.000	
	Belanja Sewa Hotel	-					137.720.000	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					76.480.000	-	-	
	-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	28.264.000	28.264.000	
	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					-	18.150.000	18.150.000	
1.03.11.2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam			-	-	-	
1.03.11.2.0 2.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					-	-	-	
1.03.11.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-	-	-	
1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					-	-	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.11.2.0 4.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					-	-	-	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase tingkat kesiapan dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang	93.41 %	15.07 %	7.908.830.000	1.776.897.728	-6.131.932.272	
1.03.12.2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	104 dokumen	402 dokumen	6.068.642.520	847.498.000	-5.221.144.520	
1.03.12.2.0 1.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	102 dokumen	401 dokumen	2.718.671.000	782.160.000	-1.936.511.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.410.000	1.311.000	1.311.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					39.600.000	42.900.000	42.900.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					715.200.000	639.600.000	639.600.000	
	Belanja Sewa Hotel	-					11.200.000	-	-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					-	98.349.000	98.349.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-					4.200.000	-	-	
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-					1.855.541.000	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					90.520.000	-	-	
1.03.12.2.0 1.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	3.349.971.520	65.338.000	-3.284.633.520	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					30.050.000	14.518.000	14.518.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					33.000.000	50.820.000	50.820.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					2.986.591.520	-	2.986.591.520	
	Belanja Sewa Hotel	-					81.200.000	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					219.130.000	-	-	
1.03.12.2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	100 dokumen	-	250.630.000	-	-	
1.03.12.2.0 2.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 kegiatan	-	250.630.000	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-					23.100.100	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Bias	-					219.130.000	-	-	
1.03.12.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	2 dokumen	1 dokumen	943.820.000	761.234.528	-182.585.472	
1.03.12.2.0 3.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	1 dokumen	845.180.000	761.234.528	-83.945.472	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.960.000	10.956.000	6.996.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-					4.200.000	-	-	
	Belanja Sewa Hotel	-					11.200.000	-	-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					750.400.000	750.278.528	-121.472	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					75.420.000	-	-	
1.03.12.2.0 3.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	-	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-	1 Dokumen	1 Dokumen	98.640.000	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-					2.640.000	-	-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	-					96.000.000	-	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1.03.12.2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	7 Dokumen	5 Dokumen	645.737.480	168.165.200	-477.572.280	
1.03.12.2.0 4.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	267.873.480	168.165.200	-99.708.280	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					-	7.420.000	7.420.000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					79.300.000	58.300.000	-21.000.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					4.800.000	3.400.000	-1.400.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					171.360	121.800	-49.560	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					514.080	365.400	-148.680	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					120.795.000	-	-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang					-	98.558.000	98.558.000	
1.03.12.2.0 4.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	-	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	-	61.512.000	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-					15.312.000	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-					46.200.000	-	-	
1.03.12.2.0 4.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	-	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	-	316.352.000	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-					2.622.000	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-					33.000.000	-	-	
	Belanja Sewa Hotel	-					61.600.000	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-					219.130.000	-	-	



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1. Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait urusan pekerjaan umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan. Guna untuk mendukung program prioritas pimpinan di bidang penyediaan air bersih, diharapkan untuk dapat lebih memprioritaskan anggaran kedepannya. Selain untuk mendukung program prioritas pimpinan juga mendukung Standar Pelayanan Minimal yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat yakni :

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Selain itu di Tahun 2025 ini keluar aturan dari pusat yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2025;



2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD



Formulir E.70
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
 Kabupaten/Kota : BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		√	Tidak termasuk dalam tahapan perubahan Renja	
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Tidak termasuk dalam tahapan perubahan Renja	
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota		√	Tidak termasuk dalam tahapan perubahan Renja	
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	Tidak termasuk dalam tahapan perubahan Renja	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√	Tidak termasuk dalam tahapan perubahan Renja	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Batam, 01 Juli 2025
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, M.T
Pembina Tk. I
NIP. 19730408 200212 1 005



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a BAB I PENDAHULUAN
 - b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
 - c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:
- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
 - b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

